

**FUNGSI CAMAT SEBAGAI ADMINISTRATOR
PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI WILAYAH KECAMATAN
SUNGAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH

Nilawati

NIM : 95.850.0019

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
1 9 9 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : FUNGSI CAMAT SEBAGAI ADMINISTRATOR
PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI WILAYAH KECAMATAN
SUNGAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI
SERDANG

Nama Mahasiswi : *NILAWATI*

No. Stambuk : 95.850.0019

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Drs. T.D. Marpaung, MA

Pembimbing II



Dra. Rosmala Dewi

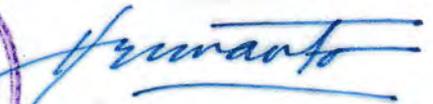
Mengetahui

Ketua Jurusan



Drs. Irwan Nasution, SP

Dekan



Drs. Heri Kusmanto, MA

Tgl Lulus : 5 Nopember 1999

RINGKASAN

FUNGSI CAMAT SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG

OLEH

NILAWATI

NIM : 95.850.0019

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Kecamatan adalah sebuah wilayah yang berada di bawah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya. Kedudukan kecamatan yang sedemikian memberikan arti bahwa kecamatan adalah sebuah pola pemerintahan yang secara langsung bersinggungan dengan tatanan kehidupan masyarakat. Sehingga dengan akibat yang demikian sangatlah dibutuhkan peranan dari pelaku pemerintahan di wilayah kecamatan untuk benar-benar memfungsikan dirinya sebagai pelaksana pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya.

Kecamatan dipimpin oleh camat sebagai suatu jenjang jabatan yang tertinggi. Pada camat pengkoordiniran perintah dan tata laksana pemerintahan dijalankan. Kedudukan camat yang sedemikian memberi arti bahwa camat adalah sebagai administrator pemerintahan.

Dalam pelaksanaan penelitian untuk mendukung pembahasan skripsi ini maka penulis mengadakan pembatasan masalah pada Kantor Kecamatan Sunggal Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. Penelitian dilaksanakan dengan cara

mengumpulkan data –data melalui studi kepustakaan dan juga penelitian di lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka didapatkan keadaan-keadaan sebagai berikut,

Bahwa fungsi dan peranan Camat sebagai kepala Wilayah dimaksudkan sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan, administrator kemasyarakatan telah dilaksanakan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Hal ini terlihat dari susunan organisasi pola pembagian tugas atau kerja yang ada pada kantor Camat Sunggal Kabupaten daerah Tingkat II Deli Serdang yang secara terperinci dan telah nyata adanya pembagian tugas yang jelas antara seluruh aparat-aparat pemerintahan yang ada telah terkait serta saling dukung mendukung untuk mewujudkan akan tujuan-tujuan pembangunan.

Camat dalam menjalankan fungsi koordinasinya terhadap semua pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, selalu mengadakan kunjungan, tatap muka dengan pemuka masyarakat di samping juga mengadakan pertemuan-pertemuannya dengan Lurah/Kepala Desa yang ada di Kecamatan Sunggal.

Bertitik tolak pada hipotesis di atas yaitu jika Camat dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal di Kecamatannya dengan baik maka fungsi dan perannya selaku Kepala Wilayah dapat tercapai dengan baik, karena di dalam, melaksanakan tugasnya Camat harus bekerjasama dengan instansi vertikal yang ada di Kecamatannya. Maka dengan ini hipotesis di atas dapat diterima.

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulitas kepada alam yang terang benderang dengan nikmat Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah "***Fungsi Camat Sebagai Administrator Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Sunggal Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang***".

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka

pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area .
- Bapak Drs. T.D. Marpaung, MA, selaku Dosen Pembimbing I penulis.
- Ibu Dra. Rosmala Dewi, selaku Dosen Pembimbing II penulis.
- Bapak Camat Kecamatan Sunggal Kabupaten Daerah tingkat II deli Serdang beserta unsur staf dimana penulis mengadakan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, bagi keduanya bakti dan doa penulis. Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 1999

Penulis

Nilawati

NIM : 95.850.0019

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Hipotesis	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Pemerintahan	12
B. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah ...	13
C. Fungsi Camat Sebagai Kepala Wilayah	18
D. Pengertian Pembangunan	21
E. Pengertian dan jenis-Jenis Koordinasi	24

BAB III.	METODOLOGI PENELITIAN	29
	A. Populasi dan Sampel	29
	B. Metode Pengumpulan Data	30
	C. Variabel dan Definisi Operasional	30
	D. Teknik Analisis Data	32
BAB IV.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
	A. Sejarah Singkat Kecamatan Sunggal	34
	B. Letak Geografis Kecamatan Sunggal	35
	C. Demografi Kecamatan Sunggal	37
	D. Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Sunggal dan Uraian Tugas	44
BAB V.	ANALISIS DATA	51
	A. Analisis Struktur Organisasi	51
	B. Analisis Terhadap Tugas dan Fungsi Camat Sebagai Kepala Wilayah	53
	C. Kedudukan dan Wewenang Camat Selaku Kepala Pemerintahan di Wilayahnya	58
	D. Analisis Terhadap Penyelenggaraan Koordinasi di Wilayah Kecamatan	62
BAB VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran-Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA	66
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

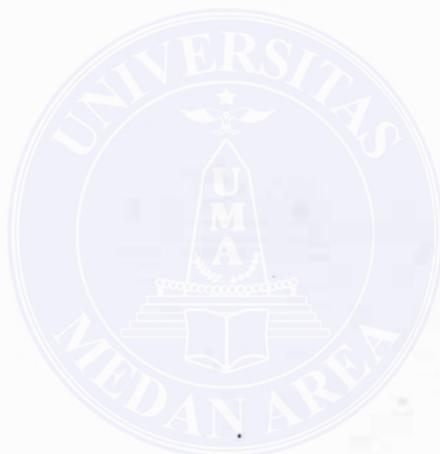
	Halaman
1. Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan Tahun 1998	36
2. Penggunaan Tanah di Kecamatan Sunggal Tahun 1998	37
3. Banyaknya Penduduk Menurut Umur Tahun 1998	38
4. Banyaknya Penduduk Menurut Agama Tahun 1998	39
5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Tahun 1998 ...	40
6. Banyaknya Penduduk Menurut Suku Tahun 1998	41
7. Jumlah Sarana Ibadah Tahun 1998	42
8. Jumlah Sarana Perekonomian tahun 1998	43



DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sunggal Kabupaten
Daerah Tingkat II Deli Serdang 50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah alat untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa, sedangkan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan itu diperlukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan dapat terlaksana dengan adanya usaha-usaha kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan tanpa landasan, tujuan dan arah yang jelas tidak akan memperoleh hasil yang baik. Oleh karena itu di samping kemampuan aparat pemerintah sebagai perencana, pelaksana dan pengawas dari pembangunan itu diperlukan juga adanya partisipasi aktif dari masyarakat guna mensukseskan pembangunan itu.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pembangunan telah dilaksanakan, namun mengalami hambatan-hambatan yang sangat fatal akibat gejolak-gejolak politik di tanah air.

Berdasarkan Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN) Tahun 1993 maka pembangunan itu dilaksanakan secara bertahap. GBHN adalah cerminan pernyataan kehendak rakyat untuk memberikan arah bagi pembangunan Nasional. Kegiatan pembangunan dilakukan melalui pembangunan sektoral

dan pembangunan daerah serta dilaksanakan secara terpadu dan saling mengisi.

Pada hakekatnya fungsi dan peranan Pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan terutama dalam rangka membangun masyarakat, bagi setiap negara tidak selalu sama. Hal ini tergantung pada beberapa hal pokok antara lain :

" Pertama adalah falsafah hidup kemasyarakatan dan kedua adalah falsafah politik masyarakat tersebut. Fungsi dan peranan pemerintah seringkali tergantung tingkat kemajuan suatu negara terutama di bidang ekonomi materiil ".¹⁾

Seperti halnya dalam negara-negara yang sedang berkembang atau negara dunia ketiga, dimana pada umumnya kondisi masyarakatnya masih bersifat tradisional ataupun dengan lain perkataan masyarakatnya sedang mengalami proses peralihan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, pada umumnya fungsi dan peranan Pemerintah sangat menonjol. Hal ini dimungkinkan oleh karena keberadaan masyarakatnya ataupun oleh ciri-ciri yang terdapat di dalam masyarakatnya.

Pada umumnya negara-negara dunia ketiga belum mempunyai ekonomi yang stabil dan penduduknya pun tidak dapat dikatakan penghasilan per-kapitanya masih rendah. Biasanya perekonomiannya pun masih tradisional. Pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan baru belum dapat menyusup sampai

¹⁾ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1974, hal. 17.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, **Prosedur Penelitian**, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Atmosoedirjo, S, Prajudi, **Dasar-Dasar Ilmu administrasi**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Handayaniingrat, Soewarno, **Administrasi Pemerintahan, Dalam Pembangunan Nasional**, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
- Hatta, Mohammad, **Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan**, Mutiara, Jakarta, 1980.
- Kansil, C.S.T. , SH, **Peraturan Tata Pemerintahan Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Kartono, Kartini, Dra, **Pengantar Metodologi Research Sosial**, Alumni, Bandung, 1980.
- Nawawi, Hadari, **Metode Penelitian Sosial**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1987.
- Ndraha, Taliziduhu, **Methodologi Pemerintahan Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Phil Astrid, DR, **Sosiologi Pembangunan**. Terjemahan Oleh S. Susanto, Bina Cipta, Jakarta, 1984.
- Rakhmat, Jalaluddin, Drs, **Metode Penelitian Komunikasi**, PT. Remadja Karya, Bandung, 1985.
- Sarwoto, Drs, **Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Siagian, Sondang P. Prof, DR, MPA, **Administrasi Pembangunan**, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1970.

Sudjana, **Statistika**, Tarsito, Bandung, 1986.

Sugiono, **Metode Penelitian Administrasi**, Alpa Beta, Jakarta, 1992.

Suhardi, Prof, RA, SH, **Politik Sosial Modern, Dasar dan Directiva**, yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 1983.

Tjokroamidjojo, Bintoro, **Pengantar Administrasi Pembangunan**, LP3ES, Jakarta, 1974.

Surakhmad, Winarno, **Pengantar Penelitian Ilmiah**, Tarsito, Bandung, 1980.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, **Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah**, Politeia, Bogor, 1980.

